



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

**AKUNTABILITAS DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DI MASJID**

Dahnil Anzar Simanjuntak
Yeni Januarsari
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify and understand the accounting practices and financial management in the mosque. In particular, this study intends to find out how transparency and accountability in financial management of the Mosque is run. Qualitative Method used in this researched. This study try to verify the accounting practice in Mosque, and describe it. Simple accounting used by mosque official created transparency and accountability, and influences of "ibadah" that done by Muslim society in surrounding Mosque. Accounting practice applied in Baitusalam for transparency and accountability, creating a dilemma of transparency and accountability. In common condition accounting applied could encourage transparency and accountability, but in Ketapang where the Baitusalam Mosque exists, transparency and accountability show a motive, in Islam called as "ria". This Researched important for presenting accountancy that out of mainstream entity and giving contribution for civilization.

Keyword: *Transparency and Accountability, Mosque Accounting, Theology Accounting, Qualitative Research*

I. Latar Belakang

Allah SWT melalui Al Quran surat Al Baqarah 282 berfirman:

" Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan."

Penggalan Surat Al Baqarah 282 tersebut diatas secara implisit memberikan pesan bahwa Islam mendorong praktik akuntansi dalam kehidupan bermuamalah (perdagangan). Pada dasarnya, ilmu akuntansi dan praktek akuntansi di lingkungan bisnis (muamalah) telah menjadi bagian yang integral. Namun, ilmu akuntansi dan prakteknya di luar entitas bisnis khususnya lembaga keagamaan sangat termarginalkan. Sebagai entitas pelaporan akuntansi yang menggunakan dana



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

masyarakat sebagai sumber keuangannya dalam bentuk sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat (publik), masjid menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berada yang berbeda dengan entitas publik lainnya.

Masjid merupakan entitas publik dimana nilai-nilai spiritual Islam dikembangkan dan nilai-nilai spiritual tersebut seringkali tidak dapat berdamai dengan nilai-nilai materialisme lainnya yang biasa eksis pada entitas pelaporan akuntansi lainnya seperti perusahaan atau entitas sektor publik lainnya. Booth (1993) menjelaskan bahwa, Pemisahan kehidupan spiritual dan keduniawian menempatkan akuntansi sebagai ilmu yang didasari oleh pemahaman sekuler, menyebabkan institusi keagamaan seperti gereja, hanya mentolelir peran akuntansi pada batas mendukung kegiatan spritual, tidak terintegrasi dalam mendukung tugas-tugas suci keagamaan. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, Akuntansi pada dasarnya adalah *tools* yang dapat mendukung kinerja entitas dimana akuntansi itu dipraktekkan.

Praktek akuntansi pada lembaga-lembaga keagamaan atau lembaga Nirlaba lainnya merupakan sesuatu yang tidak lazim. Walaupun tidak lazim, penelitian praktek akuntansi pada lembaga keagamaan seperti gereja banyak dilakukan oleh beberapa peneliti Akuntansi. Helen Irvine (2004) menyimpulkan bahwa, Pendeta dan orang awam percaya bahwa akuntansi tidak mengganggu agenda suci yang dikerjakan oleh Gereja, sebaliknya, akuntansi adalah bagian penting yang terintegrasi dengan kepentingan Gereja untuk mencapai misi kudus, karena Gereja berkepentingan dengan



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

peningkatan dana dan manajemen keuangan yang baik untuk mencapai misinya. Kerry Jacob (2004) menyimpulkan bahwa, berdasarkan teori *A Clash of Jurisdictional* yang dikemukakan oleh Abbot (1988), terdapat pemisahan wewenang antara masing-masing profesi yang tidak mungkin saling memahami sehingga muncul konflik antara Akuntan dengan Rohaniawan. Teori yang disampaikan Laughlin (1988) yang menyatakan ada pemisahan antara akuntansi sebagai Ilmu sekuler dengan kehidupan keagamaan yang penuh dengan kekudusan mendorong *Jurisdictional Conflict* tersebut. Disisi lain, Jacob (2004) juga mengutip pendapat Eliade (1959) yang menyatakan bahwa bagi seseorang yang sangat religius maka semua sudut pandangannya akan sesuatu selalu didasari oleh pemahaman spiritual, oleh karena itu maka praktek akuntansinya pun akan dipenuhi dengan dimensi spiritual, sebaliknya bagi seseorang yang tidak religius maka dipersepsikan bahwa akuntansi merupakan ilmu bebas dari pengaruh dimensi spiritual.

Penelitian Peran dan praktek akuntansi pada entitas keagamaan seperti Gereja setidaknya lebih maju dibandingkan dengan penelitian akuntansi di entitas keagamaan lainnya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengisi kekosongan penelitian akuntansi pada entitas keagamaan Islam yakni Masjid, sebagai pusat pengembangan peradaban dan kehidupan spritual umat Islam, karena entitas masjid jarang sekali menjadi perhatian peneliti akuntansi sebelumnya. Selain itu, agar eksistensi dan kebermanfaatan akuntansi pada entitas ini memperoleh perwujudan yang konkret dan dapat memaksimalkan perannya sebagai instrumen pengembangan dakwah di Masjid. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami praktik akuntansi dan pengelolaan keuangan di masjid. Secara khusus penelitian



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan Masjid dijalankan.

Transparansi dan Akuntantabilitas merupakan keniscayaan. Semua aktivitas lembaga baik publik maupun swasta selalu dituntut transparan dan akuntabel. Kehidupan keagamaan seakan menjadi dimensi lain yang tidak memerlukan transparansi dan akuntabilitas secara langsung dalam bentuk pelaporan akuntansi. Praktek akuntansi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas di entitas keagamaan khususnya Islam melalui Masjid jarang sekali menjadi perhatian khusus dalam praktik dan kajian ilmiah, oleh sebab itu, penelitian ini menjadi unik dan sangat penting untuk menemukenali praktik akuntansi dan pengelolaan keuangan di Masjid, sehingga penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan : bagaimana praktik akuntansi dan pengelolaan keuangan dilakukan oleh para pengurus Masjid?

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian akuntansi diluar penelitian akuntansi mainstream, dengan metode yang alternatif juga. Melalui ,penelitian ini diharapkan ditemukan teori dan model yang cocok untuk menerapkan ilmu akuntansi di entitas keagamaan seperti Masjid, peneliti berharap Masjid menemukan model akuntabilitas dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masjid sebagai entitas publik dalam rangka mengakselerasi kegiatan dakwah dan misi memperbaiki moral melalui praktek-praktek pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Melalui penelitian ini, peneliti berharap tidak terjadi logosentrisme atau monopoli pendekatan ilmiah dalam penelitian akuntansi, melalui revitalisasi metode kualitatif dalam penelitian-penelitian akuntansi.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi dan Teologi

Kebanyakan ilmuan akuntansi mengikuti mainstream penelitian akuntansi yakni penelitian yang berbasis pada metode kuantitatif. Selain itu, pemahaman ilmuan akuntansi kebanyakan dibangun berdasarkan pondasi kaca mata kuda yakni akuntansi hanya bekerja sekitar organisasi laba atau organisasi nirlaba yang bebas dari pengaruh teologi maupun ideologi tertentu. Jacob (2004) mengutip Eliade (1959) menyatakan bahwa, "bagi seseorang yang sangat religius maka semua sudut pandangannya akan sesuatu selalu didasari oleh pemahaman spiritual, oleh karena itu maka praktek akuntansinya pun akan dipenuhi dengan dimensi spiritual, sebaliknya bagi seseorang yang tidak religius maka persepsinya adalah akuntansi merupakan ilmu bebas dari pengaruh dimensi spiritual". Akuntansi adalah bagian dari ilmu dan praktik keduniawian yang terpisah dari kehidupan dan praktik maupun nilai keagamaan atau spiritual (Laughlin, 1993). Eliade (1959) menyatakan persepsi entitas keagamaan seperti Gereja didominasi oleh pemahaman bahwa akuntansi adalah praktik yang domain kerjanya hanya pada praktik keuangan yang berkarakteristik duniawi, sehingga entitas keagamaan menganggap disiplin ilmu ini tidak banyak dibutuhkan dalam kerja-kerja pelayanan di lembaga keagamaan.

Triuwono (2000) menyatakan, akuntansi dibentuk oleh lingkungannya melalui interaksi sosial yang kompleks (*complicated social interaction*), namun mengutip Sombart dalam Triuwono (2000), ia dapat juga dapat berbalik mempengaruhi lingkungannya. Seperti yang disampaikan oleh Mathew dan Parera (1993) dalam Triuwono (2000) menyatakan walaupun pandangan tradisional melihat bahwa akuntansi dibangun melalui interaksi sosial (*social constructed*) sebagai hasil



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sn14aceh.com

dari kejadian sosial, ekonomi, dan politik, namun ada pendekatan lain yang melihat bahwa akuntansi dapat membentuk lingkungannya dengan interaksi sosial (*socially constructing*). Ini membuktikan bahwa akuntansi bukanlah suatu bentuk ilmu pengetahuan dan praktik yang bebas nilai (*value free*), tetapi sebaliknya ia adalah disiplin dan praktik dan sangat sarat dengan nilai.

Capra (1997, 255-6) menyatakan tidak ada yang disebut dengan ilmu sosial (akuntansi) yang bebas nilai, ilmuwan sosial (peneliti akuntansi) yang menganggap pertanyaan tentang nilai-nilai sebagai sesuatu yang "non-ilmiah" dan berpendapat bahwa mereka akan menghindarinya berarti melakukan suatu yang tidak mungkin. Menurut Triyuwono (2000) berdasarkan Capra (1997) akuntansi yang bebas nilai adalah suatu hal yang mengada-ada. Karena dalam kenyataannya, pertama, akuntan sendiri tidak akan bisa menanggalkan "nilai" misalnya, ilmu pengetahuan, pengalaman, sifat, dan nilai dalam masyarakat, yang melekat secara inheren dalam "diri"-nya. Akuntan bukan "tabula rasa". Kedua, realitas yang diteliti adalah realitas yang tidak bebas nilai, karena realitas tersebut dibangun melalui proses interaksi sosial (*social construction*). Dan ketiga, metodologi yang sarat dengan nilai-nilai maskulin. Ketika sifat-sifat maskulin "Yang" ini dominan dan memarjinalkan sifat-sifat feminim *Yin*, maka ketidak-seimbangan, atau destruktif, atau krisis, tatanan sosial akan tercipta dimana keadaan tersebut tidak lain disebabkan oleh metodologi ilmu pengetahuan modern yang maskulin.

Triyuwono (2000) menyatakan konsep akuntansi yang mengedepankan *enterprise theory* hanya memandang bahwa *income* yang diperoleh perusahaan merupakan hasil dari usaha kooperatif dari banyak partisipan (*stakeholders*). Oleh karena itu, *income* secara ideal didistribusikan kepada *stakeholders* atau konsep yang lebih



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sn14aceh.com

luas menurut perspektif Islam menghendaki *income* harus didistribusikan kepada *stakeholders* dan *universe*, hal ini tidak dapat dilakukan oleh sifat egoisme seperti dalam *enterprise theory* tetapi dapat dilakukan apabila sifat altruisme atau mementingkan orang lain daripada diri sendiri, dihadirkan dalam akuntansi seperti yang lazim berada dalam praktek teologi.

Akuntansi *meanstream* menurut Triyuwono (2000) sangat identik dengan angka-angka. Angka adalah "pusat", tanpa angka, akuntansi menjadi suatu hal yang mustahil dan implikasinya adalah kita tidak dapat menggambarkan keadaan perusahaan atau entitas pelaporan lainnya. Mitologi angka-angka akuntansi yang juga ternyata merupakan sifat dari Yang perlu di rekonstruksi, mengingat informasi kuantitatif tidak cukup memadai untuk memberikan gambaran yang relatif lebih utuh tentang keadaan entitas pelaporan. Dengan kata lain, informasi kualitatif yang selama ini dimarginalkan, perlu diangkat dan diposisikan sejajar dengan informasi kuantitatif.

2.2 Entitas Keagamaan Dan Good Governance

Persepsi bahwa entitas keagamaan tidak membutuhkan pengelolaan yang baik (*Good Governance*) menyebabkan praktik akuntabilitas dan transparansi dalam entitas ini tidak memiliki bentuknya. Semua praktik keuangan dan pengelolaan kelembagaan hanya didasari oleh kepercayaan (*Trust Agency*) tanpa memiliki sistem untuk mewujudkan kepercayaan tersebut kepada masyarakat.¹ *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan

¹ Penelitian ini, akan didekatkan teori *Good Governance* kepada praktik pengelolaan entitas keagamaan yakni masjid.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

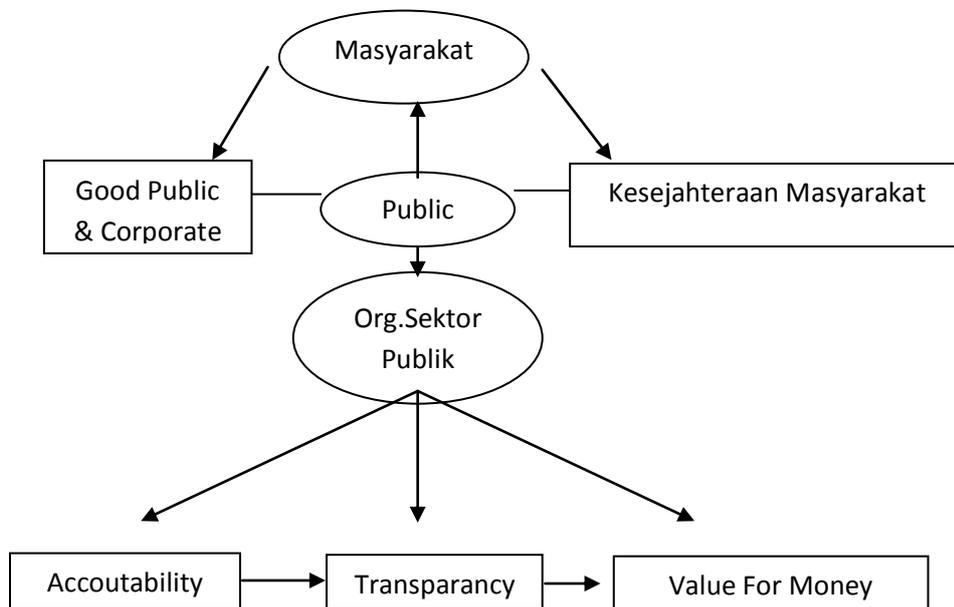
defenisi *governance* sebagai *"the way state power is used in managing economic and social resources for development of society"*. Sementara itu, *United Nation Development Program* (UNDP) mendefenisikan *governance* sebagai *"the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels"*. World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan negara. (Mardiasmo, 2005). UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance* yang meliputi *participation, rule of Law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and Effectiveness, accountability, dan strategic Vision*.

2.3 AKUNTABILITAS PUBLIK

Akuntabilitas publik adalah kewajiban penerima tanggungjawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Akuntabilitas berbeda dengan konsep resposibilitas (Mahmudi, 2005: 9). Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam resposibilitas. Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk rnempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang. Sedangkan resposibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban menjelaskan kepada orang/pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberi penilaian. Namun demikian, tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melakukan keleluasaan dan kewenangan. Akuntanbilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal.

Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Gambar 3.1
Kerangka Akuntabilitas Dalam Good Governance



Sumber: Mardiasmo, 2005.

2.4 Clash of Jurisdictional

Teori Clash of Jurisdictional (Abbot,1988), menyatakan profesionalitas sebuah profesi seringkali tidak dapat dipahami oleh profesi lainnya yang berbeda, sehingga profesionalitas sebuah profesi teralienasi dari profesi lainnya. Hal ini terjadi karena sistem secara praktik dan nilai memiliki perbedaan antara satu profesi dengan profesi lainnya, masing-masing profesi ingin membuktikan bahwa mereka ahli dan sangat menguasai wilayah profesinya dibandingkan orang lain, sehingga tidak memungkinkan bagi orang lain untuk masuk dan melakukan profesi yang mereka kuasai.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

Pada konteks penelitian ini, terdapat dua profesi yang berbeda perspektifnya bahwa ruang kerja akuntan (melalui praktik dan ilmu akuntansi) dan Agamawan/Ustadz/Pengurus Masjid.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode Studi Kasus (*Case Study*) yakni, pengamatan secara detail terhadap obyek atau orang, baik pada satu titik waktu atau beberapa titik waktu. Penelitian ini melibatkan data kualitatif, serta menggunakan *Logic Analytic* (Smith, 2003). Penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan yakni Masjid yang telah dipilih oleh peneliti atau dengan cara *Purposive Sampling* yakni sample yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan alasan dan tujuan khusus. Pengamatan dilakukan melalui keterlibatan secara langsung terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh obyek penelitian dalam waktu tertentu sehingga diperoleh gambaran utuh tentang praktik akuntansi di entitas pelaporan yakni Masjid, selain itu juga dilakukan wawancara secara tidak terstruktur selama proses pengamatan langsung tersebut.

Sebagai salah satu metode penelitian, studi kasus digunakan dalam banyak situasi untuk memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, bagi individu, kelompok, organisasi, sosial dan politik, serta fenomena yang berhubungan satu dengan lainnya. Studi kasus banyak diterapkan pada penelitian-penelitian psikologi, ilmu politik, pekerja sosial, bisnis dan perencanaan sosial. Namun, pendekatan studi kasus tidak familiar pada penelitian-penelitian ilmu akuntansi atau ilmu ekonomi lainnya, keunggulan pendekatan studi kasus adalah peneliti mampu memenuhi semangat keingintahuan dalam memahami fenomena sosial yang terjadi



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

dalam masyarakat, pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang holistik terhadap peneliti akan arti dari karakteristik berbagai kejadian dalam kehidupan, seperti siklus kehidupan, organisasi, proses managerial, perubahan lingkungan, hubungan internasional dan transformasi industri. (Yin, 2003)

3.2 Lokasi Studi Kasus

Lokasi penelitian yang dipilih sebagai studi kasus adalah Masjid Raya Baitusalam, Jl. Raya Tanjung Kait Desa Ketapang, Mauk Kabupaten Tangerang. Pemilihan lokasi studi kasus di Masjid ini dilatarbelakangi oleh karakter kebudayaan Islam yang masih eksis di daerah ini adalah kebudayaan Islam dengan perspektif yang tradisional, dimana instrumen modern seringkali tidak eksis dan secara umum masyarakat dengan karakter Islam tradisional seperti ini sulit menerima perubahan yang datang dan memiliki kecenderungan pro kemapanan dan paternalistik yang kuat.

3.3. Teknik Analisis

Teknik analisa yang digunakan yakni *Logic Analytic* yakni menyesuaikan berbagai hasil pengamatan dan wawancara dengan teori yang digunakannya dalam penelitian ini. Yakni, Akuntansi dan Teologi, *Good Governance*, *Clash of Jurisdictional*.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian

Masjid Baitusalam yang menjadi obyek dalam penelitian ini merupakan masjid yang berdomisili di Jalan Raya Tanjung Kait KM 3 Desa Ketapang Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. Masjid ini terletak diujung utara Kabupaten Tangerang atau pantai utara Tangerang. Masjid yang terletak di pesisir pantai ini, mayoritas penduduknya adalah nelayan. Daerah yang didominasi oleh penduduk asli Tangerang



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sn14aceh.com

yang berbahasa jawa serang ini, 97% beragama Islam. Pemahaman Islam tradisional sangat kental di daerah ini. Model shalat jum'at seperti yang dipraktekkan oleh Masjid Baitusalam banyak juga dilakukan oleh masjid-masjid yang memiliki basis tradisional yang kuat dengan peran sentral kepemimpinan sosial oleh seorang ulama, demikian juga dengan seremonial pengumpulan zakat, masjid ini tidak melakukan tugasnya sebagai amil, karena kebiasaan masyarakat sekitar masjid tidak membayar zakat melalui masjid tetapi melalui para Kiyai atau ulama yang mereka percayai.

Peran sentral seorang pemuka agama atau kiyai masih dominan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Islam di daerah Utara Tangerang ini. Masjid Raya Baitusalam sebagai salah satu pusat kegiatan keagamaan Islam di Desa Ketapang memiliki peran penting dalam membangun kehidupan sosial budaya di daerah ini. Ramainya kegiatan keagamaan rutin seperti shalat berjamaah setidaknya menjadi indikator awal selain fakta-fakta pengaruh kebudayaan diatas yang telah dijelaskan bahwa kehidupan keagamaan masyarakat sekitar masjid Baitusalam sangat dipengaruhi oleh keberadaan masjid ini. Masjid yang dipimpin oleh ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Ustadz Nuarsid, dan sekretaris Ustadz Bunyamin, serta bendahara Ustadz Embay, secara kelembagaan tidak dikelola dengan formal, karena kepengurusan DKM hanya fokus pada ketiga orang pengurus inti tersebut, bahkan sulit mendapatkan struktur organisasi yang resmi.

4.2 Eksistensi Akuntansi Di Masjid Dalam Konteks Teologi Islam

Bagi individu yang otonom, misalnya, akuntansi kemungkinan dipandang sebagai sebuah realitas sosial yang dibangun oleh individu tersebut, atau individu - individu lain sebagai anggota masyarakat melalui interaksi-interaksi sosial yang



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

kompleks. Francis (1990) dalam Triyuwono (2000) menyatakan meskipun sedikit perhatian yang diberikan pada tingkat mikro (individu, atau diri atau akuntan itu sendiri) tetap menganggap aspek ini sangat krusial. Francis mengedepankan pentingnya peran seorang akuntan sebagai agen moral dalam wacana etika dan praktek akuntansi. Akuntansi menurut Francis, adalah "praktek moral sekaligus diskursif" yang terkait dengan dimensi moral (etis) individu. Masjid sebagai entitas akuntansi yang tidak mendapat perhatian dari akuntan maupun para ilmuwan akuntansi, sebenarnya telah membangun persepsinya sendiri tentang akuntansi. Seperti yang disampaikan ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baitusalam, Nuarsid.

" Masjid membutuhkan peran akuntansi untuk membuat laporan keuangan, supaya masyarakat dan jamaah tahu dana-dana kotak jum'at dan sumbangan-sumbangan yang berasal dari jam'ah dipergunakan untuk apa saja. Kami sadar, menjadi pengurus DKM adalah amanah, dan gak digaji, tetapi tetap saja masyarakat dan jamaah sini suka curiga kalau ada sumbangan-sumbangan besar, maka kami selalu melaporkan setiap bulan melalui rapat DKM tentang keadaan keuangan masjid serta setiap Jum'at diumumkan kepada Jama'ah".²

Ketua DKM Baitusalam, sadar betul tentang pentingnya menggunakan akuntansi sebagai instrumen akuntabilitas. Laporan keuangan dibuat oleh masjid dalam rangka menjawab kecurigaan yang sering muncul dari jamaah masjid Baitusalam dan masyarakat sekitar tentang penggunaan dana-dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat maupun sumbangan dari instansi pemerintah dalam rangka pembangunan masjid, maupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh masjid secara rutin. Penyebab utama penggunaan akuntansi dalam rangka menyampaikan laporan keuangan masjid dilakukan oleh masjid Baitusalam lebih karena kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas dan keterbukaan serta kekhawatiran dengan adanya

² Pernyataan disampaikan dalam Diskusi dengan peneliti, pada tanggal 30/09/2010 di rumah Ketua DKM.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

bingkai "kecurigaan". Bingkai "kecurigaan" dengan motif takut kredibilitas dan wibawanya turun tercermin dari pernyataan Ketua DKM Nuarsid berikut ini;

"Padahal kami pengurus DKM menjadi pengurus secara ikhlas dan tidak digaji hanya berharap dapat pahala dari Allah Swt, tapi masyarakat seringkali berburuk sangka dan tidak puas dengan kinerja kami, tetapi kami bekerja saja maksimal, kan Allah Swt maha tahu"

Kredibilitas dan wibawa individu maupun entitas DKM Masjid Baitusalam menjadi pertimbangan utama mengapa akuntansi melalui pelaporan keuangan yang dibuat oleh pengurus DKM menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan masjid. Kecurigaan dan ketidakpercayaan muncul dari jamaah Masjid Baitusalam dan masyarakat sekitar, apabila pengurus DKM tidak menyampaikan laporan secara transparan tentang pengelolaan keuangan masjid, terutama dana-dana yang berasal dari jamaah maupun instansi pemerintah yang memberikan sumbangan. Alasan tersebut juga terekam dalam pernyataan ketua DKM berikut ini:

"Kita tidak pernah menggunakan anggaran untuk keperluan dan kepentingan pribadi pengurus, tetapi tetap saja masih ada masyarakat dan jamaah yang protes dengan penggunaan dana masjid tersebut, padahal kita menggunakannya untuk keperluan pembangunan masjid atau kegiatan rutin masjid seperti untuk infaq khatib dan muadzin"

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh jamaah Masjid Baitusalam, Nurhumad Maliki, sebagai berikut:

"Akuntansi berkaitan dengan keuangan penting adanya, pelaporan yang dilakukan secara rutin menghindarkan diri khususnya, pengurus DKM dari fitnah yang akan muncul apabila pelaporan keuangan tidak dibuat oleh DKM. Sudah dibuat saja, masih muncul tuduhan-tuduhan bahwa pengurus masjid tidak terbuka dalam pengelolaan keuangan masjid, apalagi gak dibuat"³

Argumentasi berkaitan tentang diri (*self*) atau egoisme lebih menonjol, dibandingkan dengan argumentasi teologi dan kebermanfaatan akuntansi dalam kasus

³ Pernyataan ini disampaikan pada saat peneliti berdiskusi di masjid setelah mengikuti Rapat DKM dan jamaah untuk persiapan santunan yatim piatu pada bulan ramadhan.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

masjid ini, digunakan sebagai penjaga kehormatan dan eksistensi pengurus DKM dan masjid itu sendiri dalam hubungannya dengan para jamaah dan masyarakat sekitar walaupun pada faktanya, argumentasi bahwa pengurus masjid jujur dibantah sendiri oleh pengurus masjid lain yang menganggap pengelolaan keuangan masjid belum transparan dan akuntabel⁴.

Berkaitan dengan teologi, sepertinya pengurus DKM melalui ketua DKM Nuarsid secara implisit tidak menyatakan bahwa akuntansi memiliki dimensi teologis yang menjadi perintah Allah Swt, akuntansi hanya akan digunakan untuk menjawab kecurigaan-kecurigaan yang bisa muncul dalam pengelolaan keuangan masjid. Padahal dalam konteks masjid, setidaknya bingkai teologi Islam menjadi bagian penting dari praktek akuntansi. Sebagai Agama yang memiliki pergulatan panjang dalam sejarah teologi, secara konvensional memang bangunan teologi Islam sifatnya monoteisme, namun dalam faktanya Tuhan yang satu itu melahirkan keberagaman dalam pandangan dan konsepsi teologis.

Persepsi bahwa akuntansi produk sekuler yang lebih dekat dengan kegiatan entitas bisnis begitu kuat dikalangan pengurus DKM. Hal ini paralel dengan penelitian Booth (1993) yang menjelaskan bahwa pemisahan kehidupan spiritual dan keduniawian menempatkan akuntansi sebagai ilmu yang didasari oleh pemahaman sekuler, menyebabkan institusi keagamaan seperti Gereja hanya mentolelir peran akuntansi pada batas mendukung kegiatan spiritual, tidak terintegrasi dalam mendukung tugas-tugas suci keagamaan. Berbeda dengan pandangan Dhaoudi (1993) dalam Triyuwono (2000) yang berpendapat bahwa dalam Islam akan bertentangan

⁴ Hal ini dapat dilihat pada pernyataan pengurus masjid lainnya, yang akan dieksplorasi pada subbab "akuntabilitas keuangan masjid"



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sn14aceh.com

dengan sifat alamiah sesuatu bila memisahkan materi dari jiwa, karena melanggar prinsip Islam yang paling mendasar, yaitu tauhid.

Perbedaan hasil penelitian Booth (1993) dengan penelitian di Masjid Baitusalam ini adalah, pengurus DKM Masjid Baitusalam mentolelir penggunaan akuntansi sebagai pelengkap kegiatan pengelolaan Masjid, lebih karena dilatarbelakangi oleh kondisi sosial jamaah dan masyarakat yang memiliki kecenderungan curiga dan tidak percaya terhadap pengurus DKM, tanpa dari awal membangun bingkai pikir bahwa akuntansi adalah bagian integral dari teologi Islam untuk mendorong akselerasi dan kualitas kegiatan spiritual di Masjid. Bingkai pikir menjaga kehormatan, kredibilitas dan wibawa menjadi argumentasi pertama dan utama dari penggunaan akuntansi di Masjid, barulah setelah itu diikuti dengan kesadaran pentingnya peran akuntansi dalam memperbaiki pengelolaan masjid dan meningkatkan kegiatan keagamaan di Masjid. Hal ini terekam dalam pernyataan Nuarsid, ketua DKM Masjid Baitusalam berikut ini;

" Laporan keuangan sangat penting karena menghindari dari berburuk sangka dan fitnah sekaligus masyarakat sebagai donatur ingin mengetahui penggunaan dana, ini bentuk kejujuran atau transparansi kita terhadap masyarakat dan Tuhan, karena apabila kita laporkan siapa saja yang menyumbang dan menyebut namanya dipengumuman, biasanya donatur akan tertarik kembali untuk menyumbang"

Pemaknaan transparansi dan kejujuran pada konteks pernyataan Nuarsid diatas memiliki dimensi ganda, selain akuntansi melalui laporan keuangan dimaknai sebagai instrumen yang digunakan untuk memanifestasikan kejujuran dan transparansi di mata masyarakat, juga sekaligus dimaknai sebagai bentuk kejujuran dan transparansi kepada Tuhan. sehingga akuntansi menjadi bagian penting dalam ajaran teologi Islam. Hal ini pararel dengan pernyataan dari Abdul Khalik, Ketua Panitia Santunan anak yatim Masjid Baitusalam, sebagai berikut;



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sn14aceh.com

"Masjid bukan hanya tempat ritual ibadah seperti shalat tetapi menjadi tempat dan pusat dakwah Islam karena kan, dalam dakwah harus selalu dipenuhi dengan kejujuran, jadi semua yang dapat mendukung dakwah tidak ada salahnya dipergunakan termasuk akuntansi karena dengan laporan keuangan maka fitnah dan keragu-raguan jamaah atau masyarakat terhadap pengelolaan keuangan masjid dapat dihindari"⁵

Selain itu, ternyata akuntansi akan sangat bermanfaat penggunaannya untuk mengakselerasi kegiatan pengelolaan keuangan di Masjid dalam rangka memperbaiki kinerja Masjid terutama dalam proses pengumpulan dana sumbangan yang berasal dari masyarakat, pernyataan Nuarsid, berikut;

Laporan Keuangan yang dibuat secara sederhana, dengan model penerimaan dan pengeluaran saja dan diumumkan secara terbuka setiap sebelum pelaksanaan shalat jum'at dimulai dan tidak dilakukan secara rutin, memberikan akses yang positif bagi keuangan masjid dimasa yang akan datang. Pembacaan sumber-sumber penerimaan atau penyumbang ternyata mendorong penyumbang untuk kembali menyumbangkan sebagian dananya untuk kepentingan masjid, termasuk jama'ah yang tadinya tidak menyumbang ikut menyumbangkan sebagian dananya melalui pengurus masjid. Ternyata, dampak dari pengumuman tersebut mendorong akumulasi sumbangan yang diberikan oleh jama'ah dengan latar belakang karena alasan "ria"⁶ (ingin orang lain tahu) karena apabila sumbangan tidak diumumkan akan banyak jama'ah yang protes tetapi apabila pengumuman dilakukan secara rutin, maka tidak ada jama'ah yang protes berkaitan dengan penggunaan dana masjid walaupun penggunaannya tidak secara rinci disampaikan dalam laporan penerimaan dan pengeluaran masjid secara rutin. Dalam konteks praktek seperti ini akuntansi dijadikan pengurus masjid sebagai *tools* positif secara material tetapi distortif bagi teologi Islam.

⁵ Disampaikan pada Pelaksanaan santunan anak yatim, 08/09/2010

⁶ Dalam bahasa agama "ria" adalah berbuat baik bukan karena alasan mengharap ridha Allah Swt tetapi lebih karena alasan ingin pamer, dan perbuatan ini dalam Islam sangat dilarang oleh Allah Swt



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

Hal ini kontradiktif dengan penelitian yang dilakukan oleh Kerry Jacob (2004) yang menjelaskan bahwa akuntansi mampu mendorong kerja entitas keagamaan menjadi lebih baik ketika peran akuntansi di maksimalkan di lembaga keagamaan tersebut. Bahkan, akuntansi menjadi *tool* untuk memperbaiki kualitas ibadah dan pelayanan kepada umat. Penerimaan yang utuh terhadap akuntansi sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki manfaat diakui oleh pengurus masjid Baitusalam melalui Ustadz Embay. Pemahaman bahwa akuntansi merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis masih menjadi bingkai pemikiran yang disampaikan oleh Ustadz Embay. Hal ini bukan tanpa dasar karena dalam perkembangannya, Islam memperkenalkan Akuntansi melalui kegiatan perdagangan. Secara teologis, Islam membuka ruang untuk melakukan tafsir yang sesuai dengan konteks zamannya, dimana Islam itu berada. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Embay, selama akuntansi merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki manfaat bagi manusia, berarti akuntansi sangat bermanfaat bagi dakwah karena substansi dari dakwah adalah kebermamfaatan bagi umat manusia, sehingga membangun peradaban manusia yang sesuai dengan ajaran Allah Swt.

Dalam Konteks konstruksi budaya Masjid Baitusalam, akuntansi dapat diterima dengan baik sebagai instrumen yang penting bagi pengelolaan masjid sebagai bentuk perwujudan kejujuran dan pertanggungjawaban. Namun, argumentasi akuntansi merupakan bagian integral dari pemahaman teologi Islam yang dapat memperbaiki kualitas ibadah sebagai muslim justru dibangun oleh landasan penggunaan akuntansi untuk menjaga kehormatan, nama baik, dan citra kepemimpinan para pengurus DKM Masjid sebagai orang-orang yang memiliki tingkat spiritual yang lebih baik dibandingkan masyarakat awam lainnya.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

5.3 Pengelolaan Keuangan Masjid Dan Akuntabilitas Publik

Dalam konteks kasus akuntabilitas masjid Baitusalam, argumentasi akuntabilitas selain pemaknaan sesuai yang disampaikan oleh Mahmudi (2005) tetapi juga dilengkapi dengan argumentasi akuntabilitas melalui praktek akuntansi sebagai instrumennya mendorong perilaku "ria" dalam praktek peribadahan dan kontstruksi budaya yang eksis.

Masjid Baitusalam merupakan masjid yang dikelola secara tradisional sebagaimana masjid-masjid dibanyak kampung di Indonesia. Sumber-sumber keuangan masjid berasal dari sumbangan dari masyarakat dan jama'ah dalam bentuk infaq dan sedekah yang diperoleh kebanyakan pada saat pelaksanaan shalat jum'at. Selain itu, masjid juga memperoleh sumbangan yang berasal dari perorangan yang memberikan sumbangan dengan alasan-alasan pelaksanaan ibadah seperti, infaq untuk mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia, infaq untuk nazar, infaq sebagai ungkapan rasa syukur dan lain-lain. Sumber keuangan masjid juga diperoleh dari pemerintah daerah, apabila mendapatkan bantuan untuk perbaikan gedung masjid. Zakat dan infaq yang menjadi sumber keuangan masjid pada bulan ramadhan tidak dimaksimalkan sebagai pusat kegiatan masjid pada bulan suci tersebut. Masjid tidak melakukan fungsinya sebagai amil pada saat ramadhan, karena jamaah terbiasa membayar zakat dan infaq bulan ramadhan kepada kiyai atau ustadz yang memiliki pengaruh kuat dilingkungan sekitar. Laporan Keuangan yang dibuat oleh pengurus masjid masih sangat sederhana yaitu berbentuk laporan kas, dengan bentuk empat kolom yaitu uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo (Contoh laporan keuangan tersebut disajikan dalam lampiran I). Periode Laporan keuangan tidak konsisten, karena penyusunan laporan keuangan dibuat sesuai dengan kebutuhan atau kesempatan



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

para pengurus DKM yang mengurus keuangan. Sebagaimana disampaikan oleh ketua DKM Baitusalam, Nurasid, berikut ini;

"Laporan keuangan disampaikan setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali sesuai kebutuhan dan kesempatan pengurus, biasanya laporan keuangan dibuat pada saat terjadi pengeluaran uang dalam jumlah besar atau mendapat sumbangan dengan nominal yang besar dari individu atau lembaga, biasanya lembaga swasta atau pemerintah tidak meminta laporan keuangan tetapi sumbangan individu dalam jumlah besar biasanya meminta laporan keuangan dan diumumkan kepada jamaah, khususnya nama penyumbang".⁷

Argumentasi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas sepertinya tidak begitu kuat, apabila mencermati pernyataan ketua DKM diatas. Alasan desakan untuk melaporkan siapa saja yang menyumbang seringkali datang dari penyumbang sendiri agar jama'ah dan masyarakat tahu siapa yang telah menyumbang. Biasanya penyumbang mengabaikan pengawasan dan asumsi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan tersebut, termasuk pihak intitusi pemerintah daerah yang tidak mensyaratkan adanya laporan keuangan penggunaan atau alokasi dana yang telah disumbangkan bagi kegiatan atau pembangunan masjid. Fakta ini menggambarkan bahwa masyarakat, khususnya penyumbang, tidak mendorong akuntabilitas dan transparansi serta penggunaan instrumen modern akuntansi pada pengelolaan keuangan masjid. Fungsi akuntansi bergeser buka sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik, tetapi sebagai alat untuk mendorong praktek-praktek ibadah yang cenderung berdimensi "ria". Pada kasus pemerintah daerah yang tidak mensyaratkan laporan keuangan pengelolaan dana sumbangan dari pemerintah daerah menunjukkan bahwa kesadaran akan transparansi dan akuntabilitas di semua dimensi kehidupan sangat rendah. Kesadaran akan peran akuntansi sebagai instrumen perubahan sosial yang mampu mendorong model peradaban baru tidak dipahami secara baik oleh sebagian

⁷ Pernyataan disampaikan dalam Diskusi dengan peneliti, pada tanggal 30/09/2010 di rumah Ketua DKM



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

besar kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan masjid Baitusalam. Alasan tidak adanya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola keuangan masjid tergambar melalui pernyataan dari ketua DKM Baitusalam, Nuarsid berikut;

"Kami menerapkan akuntansi kekeluargaan, dimana kepercayaan menjadi bagian penting, karena sudah mau mengurus masjid saja sudah syukur, selain itu untuk membuat laporan keuangan yang baik dan benar, masjid terkendala dengan keterbatasan SDM. Jadi, Format laporan keuangan tiga kolom penerimaan, pengeluaran, dan saldo dengan menggunakan Microsoft excel sudah sangat membantu dan baik menurut kami"⁸

Akuntansi tidak dimaknai secara utuh sebagai instrumen akuntabilitas publik, tetapi akuntansi melalui laporan keuangan hanya dimaknai sebagai perangkat yang memuat angka-angka tanpa makna sebagai alat mendorong perubahan sosial. Keterbatasan sumber daya manusia, merupakan argumentasi rasional untuk mengelak dari transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu, istilah yang digunakan oleh ketua DKM Baitusalam sebagai "Akuntansi Kekeluarga" menggambarkan bahwa praktek transparansi dan akuntabilitas yang dilaksanakan berbasis kepercayaan antar pengurus DKM Baitusalam, dan kepercayaan masyarakat yang yakin bahwa pengurus Masjid merupakan pekerja sukarela, dan tidak akan berani melakukan praktek-praktek menyimpang mengingat secara spiritual mereka merupakan individu-individu yang memiliki kualitas spiritual yang lebih baik ketimbang masyarakat umum.

Pernyataan berlawanan justru ditemukan pada pernyataan-pernyataan sebelumnya, berkaitan dengan "kecurigaan-kecurigaan" yang sering muncul dari jama'ah dan masyarakat umum, demikian pula pernyataan yang kontradiktif dapat direkam dari pernyataan sekretaris DKM Baitusalam, Ustadz Embay. Berikut ini;

⁸ Pernyataan disampaikan dalam Diskusi dengan peneliti, pada tanggal 30/09/2010 di rumah Ketua DKM



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

*"saya kira pengelolaan keuangan masjid Baitusalam belum transparan pembukuan hanya diketahui sepihak oleh ketua, keterbukaan terhadap sekertaris masih kurang, sekertaris tidak menerima laporan keuangan, sama sekali tidak mengetahui kondisi keuangan masjid. Bukti tidak transparannya pengelolaan keuangan masjid Baitusalam adalah, ada kasus DKM tahun lalu mengumumkan dana sisa 10 juta, setelah dikonfirmasi Cuma 4,5 juta."*⁹

Dan juga yang disampaikan oleh Ketua DKM Baitusalam, Nuarsid;

"Pemegang dana bendahara dan ketua DKM, pembuat laporan keuangan bendahara dan ketua DKM. Tergantung dana kepada siapa diberikan, kalau uang saya terima diinformasikan kebendahara dan sebaliknya".¹⁰

Pengelolaan keuangan masjid lebih banyak hanya diketahui oleh Ketua dan Bendahara Masjid Baitusalam, sekretaris masjid juga merasa bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus masjid Baitusalam khususnya ketua dan bendahara tidak mencerminkan transparansi dan akuntabilitas, karena jangankan jama'ah atau masyarakat mengetahui secara rinci pengelolaan keuangan yang dilakukan masjid Baitusalam, pengurus saja, dalam hal ini sekretaris tidak mengetahui secara jelas pengelolaan keuangan yang dilakukan masjid, karena hanya ketua dan bendahara yang mengetahui tanpa melibatkan pengurus masjid yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, ketua DKM Baitusalam memiliki alasan tersendiri yakni;

"Kalau ada pengeluaran yang kecil biasanya tidak langsung dilaporkan, kepada pengurus atau jama'ah, laporan kas diumumkan tiap minggu apabila dibutuhkan dan kalau ada yang tahu kas masjid besar biasanya ada yang pinjam dan gak kembali, makanya diumumkan pada saat pengeluaran besar atau ada masyarakat yang nyumbang besar dan minta diumumkan".¹¹

Tidak transparannya pengelolaan keuangan masjid, bahkan kepada pengurus DKM lainnya, berdasarkan pernyataan diatas dilakukan oleh ketua dan bendahara DKM Masjid Baitusalam secara sengaja karena telah menjadi kebiasaan pengurus bahkan

⁹ Diskusi di Masjid Baitusalam dan dilanjutkan di Rumah Ustadz Embay, pada 08/09/2010

¹⁰ Pernyataan disampaikan dalam Diskusi dengan peneliti, pada tanggal 30/09/2010 di rumah Ketua DKM

¹¹ Pernyataan disampaikan dalam Diskusi dengan peneliti, pada tanggal 30/09/2010 di rumah Ketua DKM



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

jama'ah sekitar, apabila keuangan masjid berjumlah besar seringkali dimanfaatkan untuk meminjam dari kas masjid dan selalu tidak pernah kembali. Kondisi ini membuktikan bahwa kebiasaan atau kultur sosial masyarakat mempengaruhi model akuntabilitas dan transparansi yang tercipta, sehingga membutuhkan model penerapan praktek akuntansi yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan strategi kebudayaan yang eksis dalam masyarakat bersangkutan.

Konstelasi, kebudayaan individu dan jama'ah mempengaruhi implementasi transparansi dan akuntabilitas. Eksistensi akuntansi justru mengganggu pengelolaan keuangan masjid, karena apabila laporan keuangan disampaikan secara transparan dan jama'ah mengetahui secara jelas jumlah kas yang dimiliki oleh masjid, dan pengurus menolak memberikan pinjaman dari uang kas masjid akan menyebabkan implikasi yang negatif bagi keberadaan para pengurus DKM Masjid Baitusalam. Mereka dapat dituduh tidak memiliki sensitifitas dan kepedulian terhadap jama'ah namun di sisi lain, pinjaman yang diberikan selalu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan diatas bagi peneliti merupakan "dilemma akuntabilitas dan transparansi" dengan *setting* kebudayaan tertentu akuntabilitas dan transparansi berhadapan dengan fakta budaya masyarakat yang memiliki kecenderungan tanggungjawab rendah, sehingga menghalangi eksisnya akuntabilitas dan transparansi. Di lain sisi, urgensi akuntabilitas dan transparansi justru terus didorong oleh masyarakat dan jama'ah agar pengelolaan keuangan masjid menjadi lebih baik. Seperti yang disampaikan oleh jama'ah masjid Baitusalam Abdul Khalik, berikut ini;



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

"Dengan adanya akuntansi atau laporan keuangan memudahkan DKM membuat laporan keuangan kepada masyarakat dan masyarakat tahu informasi keuangan masjid dan memungkinkan masyarakat untuk menyumbang kembali. Masjid bukan hanya tempat ibadah tapi tempat berdakwah dalam hal kebaikan seperti laporan keuangan kalau tidak ada pelaporan masyarakat bertanya penggunaan dana dan dapat menimbulkan fitnah".¹²

Dalam konteks pengelolaan keuangan masjid, perlu mendorong rekayasa sosial yang mengedepankan penggunaan akuntansi sebagai instrumen rekayasa sosial tersebut. Keuangan masjid bukan merupakan keuangan kelompok atau individu tertentu sehingga tidak dapat digunakan diluar alokasi peruntukannya. Dilemma transparansi dan akuntabilitas dalam *setting* kebudayaan masyarakat Ketapang yang ditemukan dalam penelitian ini, hanya dapat dirubah dengan konsistensi para pengurus DKM Masjid Baitusalam dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan akuntansi secara komprehensif dan tentunya secara teknis sesuai dengan kebutuhan praktek akuntansi di masjid tanpa memberatkan dan merepotkan.

5.4 Akuntansi Masjid dan *Clash Jurisdictional*

Teori Clash of Jurisdictional (Abbot,1988), menyatakan profesionalitas sebuah profesi seringkali tidak dapat dipahami oleh profesi lainnya yang berbeda, sehingga profesionalitas sebuah profesi teralienasi dari profesi lainnya. Hal ini terjadi karena sistem secara praktik dan nilai memiliki perbedaan antara satu profesi dengan profesi lainnya, masing-masing profesi ingin membuktikan bahwa mereka ahli dan sangat menguasai wilayah profesinya dibandingkan orang lain, sehingga tidak memungkinkan bagi orang lain untuk masuk dan melakukan profesi yang mereka kuasai.

¹² Pernyataan disampaikan dalam rapat kepanitian, santunan anak yatim piatu. Pada 08/09/2010



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sn14aceh.com

Akuntansi sebagai *tool* pada dasarnya dapat digunakan untuk berbagai entitas yang membutuhkan akuntabilitas. Namun, karena persepsi individu dan *meanstream* yang terbangun bahwa akuntansi hanya sesuai penggunaannya dalam entitas bisnis, dan jarang sekali praktisi maupun ilmuwan akuntansi menggunakan akuntansi pada entitas lainnya untuk membangun konstruksi sosial lain, sehingga, akuntan teralienasi menjadi profesi yang identik dengan perilaku dan praktek bisnis, yang berhenti pada angka-angka yang belakangan ini kualitas dan kebermampuan informasinya semakin dipertanyakan (Warsono, 2010). Oleh sebab itu, revitalisasi kebermampuan dan kehadiran akuntansi dalam entitas diluar entitas komersil perlu dilakukan, sebagai jawaban akan kebermampuan akuntansi bagi pembangunan dan perubahan peradaban. Pada konteks penelitian ini, terdapat dua profesi yang berbeda perspektifnya yakni Pertama akuntan melalui praktik dan ilmu akuntansi. Kedua, agamawan/Ustadz/Pengurus Masjid dengan peran dan tugasnya dalam kegiatan-kegiatan dakwah dan peribadahan di Masjid.

Peran akuntansi yang tidak konsisten digunakan dalam kasus Masjid Baitusalam, menyebabkan secara langsung tidak terjadi *clash jurisdictional*. Dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh para pengurus Masjid Baitusalam, mereka membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang secara sukarela mau membantu menghadirkan praktek akuntansi yang praktis dan sesuai untuk pengelolaan keuangan masjid. Melalui pernyataan berikut yang disampaikan oleh Abdul Khalik, Ketua Panitia Santunan Yatim dan Pengurus DKM Masjid Baitusalam;

"Dalam dakwah penuh dengan kejujuran begitu juga akuntansi. Akuntansi yang digunakan sudah cukup baik, pelaporan sudah sesuai alurnya dan masyarakat sudah puas dengan informasi yang didapat, ini karena keterbatasan masyarakat terhadap akuntansi, karena secara ideal laoran keuanagan masih kurang tapi yang terpenting masyarakat bisa membaca laporan keuangan yang disampaikan oleh masjid



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sn14aceh.com

dan bisa paham laporan tersebut, oleh sebab itu masjid sangat membutuhkan panduan praktis dan keterlibatan orang-orang yang paham akuntansi untuk membantu kerja pengurus masjid dalam memperbaiki pengelolaan keuangan dan kinerja masjid secara keseluruhan¹³.

Dari sisi, agamawan dan ustadz tidak terlihat adanya penolakan terhadap eksistensi akuntansi yang digunakan secara benar di masjid. Justru mereka mendorong pemanfaatan akuntansi, karena sadar bahwa Islam mengajarkan kejujuran dan keterbukaan serta semua aktivitas terhadap sesama manusia harus dapat dipertanggungjawabkan. Permasalahan justru muncul dari para akuntan atau ilmunan akuntansi yang memiliki kecenderungan untuk tidak bersedia masuk kedalam entitas ini, hal ini dilatarbelakangi oleh miskinnya pemahaman teologi yang dimiliki oleh para akuntan, seperti yang disinyalir oleh Jacob (2004) juga mengutip pendapat penelitian Eliade (1959) yang menyatakan bahwa bagi seseorang yang sangat religius maka semua sudut pandangannya akan sesuatu selalu didasari oleh pemahaman spiritual, oleh karena itu praktek akuntansi pun akan dipenuhi dengan dimensi spiritual, sebaliknya bagi seseorang yang tidak religius maka persepsinya adalah akuntansi merupakan ilmu bebas dari pengaruh dimensi spiritual sehingga jarang sekali ditemukan akuntan yang memiliki visi untuk membangun peradaban dengan bingkai pikir altruisme dan eksistensi akuntansi di entitas spiritual seperti masjid tidak berkembang dengan baik. Jadi, dapat dikatakan bahwa *Clash Jurisdictional* tidak terjadi pada kasus Masjid Baitusalam. Justru ustadz, agamawan yang mengelola masjid mendorong dan menginginkan kehadiran profesi akuntan untuk mendisain penggunaan akuntansi yang baik dan benar dalam pengelolaan keuangan masjid agar dapat membantu perbaikan kinerja

¹³ Disampaikan setelah rapat panitia santunan yatim piatu di Masjid Baitusalam, pada 08/09/2010



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

masjid dalam melakukan peran-peran dakwah dan pembangunan konstruksi sosial ditengah masyarakat Islam. Namun, persepsi individu akuntan yang berpikir sebagai akuntan *meanstream* yang kebanyakan yang tertarik mengembangkan diri dan akuntansi pada domain entitas *meanstream* yakni entitas komersial menjadi *barrier* pengembangan akuntansi pada entitas akuntansi yakni masjid.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Dalam Konteks konstruksi budaya Masjid Baitusalam, akuntansi dapat diterima dengan baik sebagai instrumen yang penting bagi pengelolaan masjid sebagai bentuk perwujudan kejujuran dan pertanggungjawaban. Namun, argumentasi akuntansi merupakan bagian integral dari pemahaman teologi Islam yang dapat memperbaiki kualitas ibadah sebagai muslim justru dibangun oleh landasan penggunaan akuntansi untuk menjaga kehormatan, nama baik, dan citra kepemimpinan para pengurus DKM Masjid sebagai orang-orang yang memiliki tingkat spiritual yang lebih baik dibandingkan masyarakat awam lainnya.
2. Laporan keuangan masjid dilakukan sangat sederhana. Dengan bentuk, empat kolom yakni uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo. Pelaporannya tidak dilakukan secara konsisten dan periodik. Dengan konstruksi kebudayaan yang unik di Masjid Baitusalam, sejati akuntansi dalam prakteknya mendorong transparansi dan akuntabilitas bergeser menjadi instrumen yang mendorong perilaku ibadah yang "ria". Konstruksi kebudayaan masyarakat Ketapang dimana masjid Baitusalam berada, melahirkan "Dillema transparansi dan akuntabilitas", yang menuntun pendekatan akuntansi yang khas dalam rangka mendorong perubahan konstruksi budaya tersebut untuk menjawab "Dillema transparansi dan akuntabilitas" yang hadir.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

3. *Clash Jurisdictional* tidak terjadi pada kasus Masjid Baitusalam, justru ustadz, agamawan yang mengelola masjid mendorong dan menginginkan kehadiran profesi akuntan untuk mendisain penggunaan akuntansi yang baik dan benar dalam pengelolaan keuangan masjid agar dapat membantu perbaikan kinerja masjid dalam melakukan peran-peran dakwah dan pembangunan konstruksi sosial ditengah masyarakat Islam. Namun, persepsi individu akuntan yang berpikir sebagai akuntan *meanstream* yang kebanyakan yang tertarik mengembangkan diri dan akuntansi pada domain entitas *meanstream* yakni entitas komersial menjadi *barrier* pengembangan akuntansi pada entitas akuntansi yakni masjid.

6.2 Saran

1. Mendorong konsistensi penggunaan akuntansi sebagai instrumen untuk mendorong kejujuran dan akuntabilitas akan menggeser pemahaman menjaga kehormatan diri, wibawa dan citra kepemimpinan para pengurus DKM Masjid Baitusalam kepada pemahaman bahwa akuntansi adalah bagian integral dari pelaksanaan ibadah dan dakwah Islam karena dapat membantu mengakselerasikan kinerja dakwah Islam.

2. Dillema transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid dalam konstruksi budaya Masjid Baitusalam dapat digeser menjadi budaya transparansi dan akuntabilitas seutuhnya, dengan memberikan pemahaman bahwa keuangan masjid merupakan keuangan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik dan penggunaannya tidak dapat diperuntukkan bagi kepentingan kelompok atau pribadi, dengan secara praktis tetap mempraktekkan penggunaan akuntansi yang sesuai bagi masjid secara konsisten sehingga masyarakat mengetahui penggunaan dana masjid dan perencanaan yang dibuat oleh masjid



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

secara komprehensif, sehingga perilaku meminjam yang tidak disertai pertanggungjawaban dapat diminimalisir sehingga, dilemma transparansi dan akuntabilitas tidak perlu terjadi.

3. Dibutuhkan perubahan paradigma dan peran sosial akuntansi sebagai alat yang dapat mendorong perubahan sosial, dan peningkatan kebermanfaatan akuntansi pada berbagai entitas yang hadir dalam lingkungan sosial. Fakta, *clash jurisdictional* yang tidak hadir pada pengembangan praktek akuntansi di Masjid Baitusalam sebagai sinyal bahwa akuntan dapat masuk dan berperan secara maksimal pada entitas diluar entitas *mainstream* akuntansi, oleh sebab itu pola pendidikan akuntansi yang *monoperspektif* melalui entitas tunggal seperti entitas komersil yang egoistik, harus menyisakan ruang yang sejajar bagi pengembangan akuntansi pada entitas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, A. (1988). *The System of Professions: An Essay of the Division of Expert Labour*. The University of Chicago Press, Chicago, IL.
- Alexander, Jeffrey and Weiner, Bryan. (1998). *Akuntabilitas Publik*. Prentice-Hall International. Boston.
- Eliade, M. (1958). *Patterns in Comparative Religion*, Sheed & Ward. New York, NY.
- Eliade, M. (1959). *The Sacred and The Profane: The Nature of Religion*, translated by Task, W.R. Harcourt Brace, New York, NY.
- Irvine, Helen. (2004). *Balancing Money and Mission in A Local Church Budget*. School of Accounting and Finance, University of Wollongong. Australia. *Research Article*.
- Jacob, Kerry. (2004). *The Sacred and The Secular: Examining The Role of Accounting in The Religious Context*. Departemen of Accounting and Management, School of Business. La Trobe University, Melbourne, Australia. *Research Article*.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

Jacob, Kerry and Walker, Stephen. (2004). *Accounting and Accountability in the Iona Community*. Departemen of Accounting and Management, School of Business. La Trobe University, Melbourne, Australia And Cardiff Business School, UK. Research Article.

Laughlin, R. (1988). *Accounting in its social context: an analysis of the accounting systems of the Church of England*. Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 1 No. 2, pp. 19-42.

Laughlin, R. (1990). *A model of financial accountability and the Church of England*. Financial Accountability & Management, Vol. 6 No. 2, pp. 95-114.

Laughlin, R. (1995), *Empirical research in accounting: alternative approaches and a case for middle range thinking*, AAAJ, Vol. 8 No. 1, p. 63.

Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mcphail, Ken. (2008). *Accounting and Theology an Introduction: Initiating A Dialogue Between Immediacy and Eternity*". University of Glasglow. UK. Research Article.

Tinker, Toni. (2004). *The Enlightenment and Its Discontents: Antinomies of Christianity, Islam and The Calculative Sciences*. Departemen of Accounting, University of New York. USA. Research Article.

Triyuwono, Iwan. (2000). *Organisasi dan Akuntansi Syariah*. LKiS. Yogyakarta.

Warsono, Soni. (2010). *Reformasi Akuntansi: Membongkar Bounded Rationality*". ASGARD CHAPTER. Yogyakarta.

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.snal4aceh.com

LAMPIRAN :

Tabel 1
Laporan Kas DKM Baitusalam¹⁴
Periode April 2010 s/d Juli 2010

NO	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Dari Kotak Jum'atan Bulan April	Rp870,000		
2	Dari Kotak Jum'atan Bulan Mei	Rp844,000		
3	Dari Kotak Juma'tan Bulan Juni	Rp630,000		
4	Dari Kotak Juma'tan Bulan Juli	Rp465,000		
5	Amal dari jamaah shalat janaah	Rp15,000		
6	Jariah dari ibu Hj. Hindun	Rp160,000		
7	Dari Hamba Allah	Rp100,000		
8	Saldo maret 2010	Rp11,150,700		
9	Infaq untuk Muadzin&Khatib		Rp520,000	
10	Bayar Listrik 4 Bulan		Rp290,000	
11	Cuci Hambal dan Pengeleman		Rp504,250	
12	Beli Tangga Alumunium		Rp450,000	
13	Beli Vacum Cleaner Sanyo 1200 w		Rp2,400,000	
14	Beli jadwal waktu shalat otomatis		Rp1,100,000	
15	Beli Pembersih dan Pewangi		Rp249,500	
16	Pembelian lampu 6 buah merk philip		Rp180,000	
17	Pembuatan power dan Mixxer Suara		Rp1,100,000	
18	Beli 20 buah Al quran		Rp400,000	
19	Pembuatan 3 kotak amal dan Lemari		Rp1,100,000	
	Jumlah	Rp14,234,700	Rp8,293,750	Rp5,940,950

Ket: Nota Pembelian dan perincian berada pada Bendahara

Ketua DKM

Nuarsid

Ketapang, 31 Juli 2010

Bendahara

H.Bunyamin

¹⁴ Contoh laporan keuangan asli Masjid Baitusalam terlampir